

**IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA SEHAT PADA PELAYANAN  
KESEHATAN DI PUSKESMAS  
PURUK CAHU**

Novita Ayu Saraswati, Murdiansyah Herman, Fika Fibriyanita.

Ilmu Administrasi Publik,63201,Fisip,Uniska,16120227  
Ilmu Administrasi Publik,63201,Fisip,Uniska, 1105026401  
Ilmu Administrasi Publik,63201,Fisip,Uniska, 1106036001

[novitaayusaraswati@gmail.com](mailto:novitaayusaraswati@gmail.com)

**ABSTRAK**

Novita Ayu Saraswati, NPM 16120227 “*Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat Pada Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Puruk Cahu*”. Bimbingan Bapak Dr.Murdiansyah Herman, S.Sos.,M.AP sebagai Pembimbing Utama dan Ibu Fika Fibriyanita, S.Sos.,M.AP sebagai CO pembimbing.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan program kartu Indonesia sehat pada pelayanan kesehatan dipuskesmas puruk cahu.

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa wawancara dan dokumentasi dengan beberapa informan. Analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil Implementasi dipuskesmas purukcahu belum secara maksimal diimplementasikan, hal ini disebabkan variable yang belum terpenuhi seperti koneksi jaringan, namun respon dari implementasi ini sudah baik,sumberdaya juga sudah cukup, pengambilan keputusan sudah ditetapkan pelaksanaan program dilaksanakan secara rinci.

**Kata Kunci : Implementasi, Program Kartu Indonesia Sehat, Pelayanan Kesehatan**

**ABSTRACT**

Novita Ayu Saraswati, NPM 16120227 Implementation of the Healthy Indonesia Card Program in Health Services at Puruk Cahu Health Center. Guidance Mr. Dr. Murdiansyah Herman, S.Sos., M.AP as the Main Advisor and Mrs. Fika Fibriyanita, S.Sos., M.AP as the CO supervisor.

The purpose of this study was to determine the implementation of the program in health services at the puruk cahu health center.

The research method used is a qualitative approach with descriptive research type. Data collected in the form of interviews and documentation with several informants data analysis using data collection, data reduction, data preseration, drawing conclusions and verification.

The results of the implementation of the puskesmas in the puruk cahu have not been maximally implemented this is due to unfulfilled variables such as network connections, but the response from this implementation is good, resources are also sufficient, decision making has been determined, program implementation is carried out in detail.

**Keywords: Implementation, Program Healthy Indonesian Card, Health Services.**

## I. PENDAHULUAN

Pelayanan dalam bidang kesehatan adalah salah satu bentuk kongret pelayanan publik. Pelayanan publik harus di laksanakan oleh pemerintah sebagaimana hak kebutuhan dasar masyarakat terutama dalam masalah kesehatan, seperti yang kita ketahui permasalahan kependudukan terbesar yang di hadapi pemerintah sekarang ini adalah kesehatan, dimana kesehatan merupakan sebuah investasi bagi negara, dalam artian hanya manusia sehat baik jasmani dan rohani yang dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Upaya pemerintah ini kemudian disampaikan dengan diselenggarakannya Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) agar bisa membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan agar masyarakat lebih sehat dan sejahtera, berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Kesehatan dan Undang-Undang No. 71 Tahun 2013 tentang pelayanan Kesehatan pada jaminan kesehatan, dimana pelayanan kesehatan ini meliputi semua fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas tingkat rujukan yang bekerja sama dengan BPJS.

maka dari itu Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan Program Kartu Indonesia Sehat berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat. Dalam pelaksanaannya pemerintah telah menunjuk BPJS sebagai penyelenggara, sedangkan KIS adalah programnya. Dimana Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) ini sebagai penyempurnaan Program BPJS khususnya peserta penerima bantuan iuran.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang dikenal dengan sebutan Puskesmas adalah

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya pada satu atau bagian wilayah kecamatan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dinyatakan bahwa Puskesmas berfungsi menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama. Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dinas kesehatan kabupaten/kota, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, akan mengacu pada kebijakan pembangunan kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersangkutan.

Teknis pelayanan kesehatan Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang utama bagi pemegang Kartu Indonesia Sehat, Teknisnya yaitu sistem rujukan berjenjang, pemilik KIS bisa memeriksakan kesehatan diri di puskesmas, jika terdapat masalah kesehatan yang tidak dapat ditangani di puskesmas maka dapat meminta rujukan berobat untuk mendapatkan fasilitas yang maksimal seperti rumah sakit. Seperti yang kita ketahui puskesmas memiliki sarana dan prasarana yang tidak memadai maka dari itu diberlakukan sistem rujukan agar bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal dalam pelayanan kesehatan.

Sebagian besar masyarakat di Puruk Cahu merupakan kalangan masyarakat yang berasal dari kelas ekonomi menengah kebawah yang tentu saja rentan terhadap berbagai permasalahan kesehatan seperti terbatasnya akses untuk mendapatkan fasilitas layanan kesehatan.

Berdasarkan latar belakang diatas , sebagaimana yang telah diuraikan, maka penulisan tertarik untuk melakukan penelitian khusus mengenai **“IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) PADA PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PURUK CAHU”**

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok kelompok atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Esensi utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk administrasinya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. 6 faktor yang mempengaruhi dalam implementasi program yaitu ukuran an tujuan, kebijakan, sumber daya, karakteristik para pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, dan lingkungan ekonomi, social, dan politik.

Keberhasilan implementasi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitan satu sama lain, ada banyak faktor yang mempengaruhi dan para ahli memaparkan pendapat salah satunya

Merilee S Grindle mengemukakan bahwa Keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, faktor itu tidak sendiri namun saling berkaitan yang terdiri dari content of policy dan context of implementation, (dalam Agustino,2006:1168).

Berdasarkan pendapat diatas, maka dalam penelitian ini peneliti menjelaskan variable-variabel keberhasilan implementasi kebijakan sebagai berikut :

### 1. Content Of Policy.

#### A. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi.

berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, indicator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.

#### B. Jenis manfaat yang diperoleh.

Pada poin ini content of policy berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa

jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

### C. Derajat perubahan yang ingin dicapai.

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Adapun yang ingin dijelaskan dalam poin ini adalah bahwa bebrapa besar perubahan yang hendak atau dicapai dari suatu implementasi kebijakan tersebut secara skala yang jelas.

### D. Letak pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan.

Dalam suatu kebijakan mempunyai peran penting. Maka bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan.

### E. Pelaksanaan program.

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksanaan yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan harus terdata atau terpapar jelas.

### F. Sumber-dumber daya yang digunakan.

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber daya agar pelaksanaan berjalan dengan baik.

## 2. Context of implementation

### A. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat.

Dalam suatu kebijakan perlu perhitungan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna mempelancar suatu kebijakan. Bila hal ini diperhitungkan secara matang besar kemungkinan yang hendak diimplementasikan akan jauh lebih baik

### B. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa,

lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan berpengaruh terhadap suatu keberhasilan, maka pada bagian ini dijelaskan

karakteristik dari lembaga yang turut mempengaruhi kebijakan.

### **C. tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.**

Hal ini yang dirasa lebih penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari pelaksana. Ini menjelaskan sejauh mana respon dan kepatuhan pelaksana dalam menanggapi kebijakan.

### **Program Kartu Indonesia Sehat Pada Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas**

Sesuai dengan Instruksi Presiden No 07 Tahun 2014 Tentang Kartu Indonesia Sehat telah dikeluarkan sebagaimana Program kartu Indonesia sehat merupakan bentuk perwujudan dari Nawa cita Joko Widodo dalam kampanyenya 2014 silam, Kartu Indonesia sehat atau sering disebut dengan (KIS) adalah kartu identitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan sebagai bentuk pelaksanaan program indonesia sehat mulai bulan maret 2015 dan penyempurnakan kartu sebelumnya.

KIS merupakan jaminan kesehatan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu, jadi KIS menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan. Kartu Indonesia Sehat dilatarbelakangi UU No. 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Dalam menjalankan program layanan Jaminan Kesehatan Nasional BPJS bekerjasama dengan Puskesmas, rumah sakit, klinik serta praktik dokter perorangan. BPJS kesehatan meliputi tiga jenis peserta yakni : Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), Peserta Bukan Penerima Upah (BPU), dan pekerja mandiri. Pada dasarnya program tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Namun dari program tersebut terdapat perbedaan peserta JKN dengan menggunakan KIS dan BPJS kesehatan PBI yakni :

1. KIS merupakan program jaminan kesehatan untuk warga kurang mampu, sedangkan JKN wajib dimiliki masyarakat baik mampu ataupun tidak mampu.
2. Adapun jenis fasilitas KIS tidak terbatas, sedangkan BPJS berlaku fasilitas kesehatan yang menjadi mitra.
3. Penggunaan KIS untuk segala perawatan, sedangkan BPJS hanya dipakai apabila benar-benar sakit saja.
4. KIS merupakan kartu yang disubsidi oleh pemerintah sehingga masyarakat mendaftar tanpa biaya, sedangkan BPJS terdapat biaya yang harus dibayar tiap bulan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kartu Indonesia Sehat (KIS) tetap dinaungi dan dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) kesehatan, dan dapat dilihat dari perbedaan keduanya yaitu BPJS dipungut biaya sedangkan KIS tidak ada pungutan biaya sehingga KIS bermanfaat bagi masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

## **III. METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan dan Jenis Penelitian**

- Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa deskriptif

### **Lokasi Penelitian**

- Penelitian ini berlokasi di Puskesmas Puruk Cahu

### **Sumber Data Primer dan Sekunder**

- Informasi dari kepala puskesmas puruk cahu

- Informasi dari pegawai puskesmas purukcahu
- Informasi dari masyarakat yang mempunyai kartu Indonesia sehat.
- Penelitian ini sumber data sekunder yang dipakai adalah sumber tertulis seperti jurnal, buku, majalah ilmiah dan dokumen-dokumen dari pihak yang terkait masalah implementasi program kartu Indonesia sehat.

#### Teknik Pengumpulan Data

- Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.
- Analisis data dengan proses seleksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan.

### IV. ANALISIS HASIL PENELITIAN

#### 1. IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA SEHAT PADA PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PURUK CAHU.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian menggunakan teori Merille S. Grindle :

##### 1. Content Of Policy

##### A. Kepentingan-Kepentingan Yang Mempengaruhi.

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah menyelesaikan masalah pemerintah melibatkan kepentingan-kepentingan dari pihak tertentu terkait sasaran dari kepentingan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan. Pelaksanaan ini pasti melibatkan kepentingan dan membawa dampak terhadap implementasi. Program KIS ini merupakan jaminan kesehatan nasional (JKN) yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang belum masuk rekapitan tanggungan Jaminan Kesehatan Nasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas Purukcahu mengemukakan :

*“Saya pribadi selaku Kepala Puskesmas tidak mengambil apa apa dari program ini apalagi*

*itu hanya untuk kepentingan yang menyimpang saya tidak pernah, saya hanya menjalankan sebagai mana prosedur yang ditetapkan dan selalu memprioritaskan masyarakat tidak tega rasanya saya melakukan hal yang menyimpang kesian mereka yang benar benar membutuhkan. Untuk program KIS ini di tujukan seluruh masyarakat tetapi lebih ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu”.* (wawancara 28 Juli 2020 jam 10:15 WIB).

Bidang Koordinator Puskesmas juga mengemukakan :

*“Tidak ada yang saya ambil apalagi saya yang mengobati mereka tidak ada sedikit niat untuk mengambil kepentingan lain yang menghambat terkait pelaksanaan Program KIS ini, dan program ini untuk semua masyarakat terutama yang kurang mampu”.* (wawancara 28 Juli 2020 jam 11:15 WIB)

Pernyataan yang sama ini juga dikemukakan oleh pegawai puskesmas yaitu :

*“Saya juga sebagai pegawai disini tidak pernah mengambil kepentingan-kepentingan yang menurut saya itu tidak pantas dilakukan, menikmati yang bukan hak kita, sama saja jika saya mengambil kepentingan itu berarti saya menari diatas penderitaan orang lain, untuk target itu sendiri masyarakat yang kurang mampu”* (wawancara 28 Juli 2020 jam 10:47 WIB).

Dari beberapa pernyataan informan diatas yang dilakukan, Penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak ada kepentingan yang diambil melalui program KIS oleh pelaksana, mereka hanya melaksanakan tugasnya masing masing sesuai bidang demi keberhasilan program KIS, target sasarannya pun kepada masyarakat terutama yang kurang mampu. Pelayanan yang diberikan oleh pegawai puskesmas sudah sesuai dengan SOP yang telah dibuat, kecuali jika ada pasien yang penyakitnya sudah parah maka akan di dahulukan untuk dirujuk kerumah sakit tanpa menunggu surat rujukan.

##### B. Jenis Manfaat Yang di Peroleh.

Pada point ini sangat dijelaskan bagaimana manfaat yang dirasakan berdampak positif dari suatu peimplementasian kebijakan

yang dilaksanakan. Kebijakan yang dibuat harus ada landasan hukum yang dapat merubah lebih baik dari sebelumnya, serta suatu kebijakan juga bermanfaat dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Program KIS sendiri memberikan jaminan kesehatan secara gratis bagi masyarakat yang kurang mampu agar bisa mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan, penentuannya ditentukan oleh pemerintah dan ditanggung pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas Puruk Cahu mengemukakan :

*“Tidak perlu takut berobat ketika tidak ada uang, cukup membawa kartu jaminan kesehatan sudah mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis karena sudah ditanggung pemerintah tentu ini memberi manfaat yang diperoleh untuk peningkatan kualitas kerja pegawai serta masyarakat yang kurang mampu. ( wawancara, 28 Juli 2020 jam 10:15 WIB).*

Adapula pegawai puskesmas juga mengemukakan tentang manfaat yang diperoleh dari Program KIS adalah :

*”Semua masyarakat kini dapat merasakan pelayanan kesehatan dipuskesmas secara gratis dan dilayani dengan maksimal,tentunya memiliki manfaat besar bagi mereka. (wawancara 28 Juli 2020 jam 11.15 WIB).*

Kemudian peserta KIS sebagai target dalam sasaran Program ini mengemukakan manfaat yang diperoleh :

*“Sebagai masyarakat pengguna kartu KIS saya merasakan manfaat yang besar karena dapat berobat dengan mudah dan mendapatkan pelayanan secara gratis hanya dengan membawa kartu KIS kepuskesmas. (wawancara 29 Juli 2020 Jam 12.42 WIB)*

Peserta KIS yang lain juga mengemukakan :

*“Manfaat yang saya rasakan, untuk berobat, dulu mau berobat harus mikir karena tidak punya uang, sejak ada program KIS saya mudah untuk berobat karena gratis. (wawancara 29 Juli 2020 Jam 12.26 WIB).*

Berdasarkan informasi dari wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Pegawai Puskesmas sebagai pelaksana tidak memperoleh manfaat apapun, mereka hanya implementor dalam pelaksanaan program ini. Beda halnya dengan mereka yang menjadi target dalam pelaksanaan program ini, mereka sangat merasakan manfaatnya apalagi mereka yang ekonominya kebawah dapat memperoleh pelayanan secara gratis tanpa harus menahan rasa sakit yang dirasakan lagi.

### **C. Derajat Perubahan Yang Ingin di Capai**

Dalam hal ini suatu kebijakan sangat penting untuk menentukan perubahan yang ingin dicapai dalam suatu target pelaksanaan kebijakan. Point ini membahas seberapa besar perubahan yang ingin dicapai dan kebijakan tersebut harus mempunyai skala yang jelas. Program KIS menginginkan perubahan peningkatan kesehatan dikalangan masyarakat khususnya yang kurang mampu guna memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis. Dengan adanya program ini membantu meningkatkan mereka hidup lebih sehat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh pegawai Puskesmas terkait dengan perubahan yang diharapkan dengan adanya program ini :

*“Di harapkan agar pelayanan kepada peserta KIS dapat ditingkatkan, selain itu juga semoga peserta KIS benar-benar terbantu dengan adanya program ini dan bisa memperbaiki pola hidup mereka agar lebih memerhatikan kesehatan. (wawancara 28 Juli 2020 Jam 10.47 WIB).*

Sehubung dengan adanya perubahan yang diharapkan dari pelaksanaan program peserta KIS juga mengatakan :

*“Saya rasa Program KIS yang dilaksanakan ini sudah baik, harapan kedepannya semoga lebih baik lagi. (wawancara 29 Juli 2020 Jam 12.42 WIB).*

Peserta KIS lainnya juga mengemukakan :

*“Harapan saya semoga bisa meningkatkan system pelayanan baik perilaku pegawai*

maupun ketersediaan sarana dan prasarana. (wawancara 29 Juli 2020 Jam 12.26 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas, terkait perubahan yang diharapkan peneliti menyimpulkan bahwa Pegawai Puskesmas sebagai pelaksana program ingin memberikan yang terbaik kepada peserta KIS agar merasakan pelayanan yang maksimal, kemudian harapan peserta KIS ialah meningkatkan pelayanan agar lebih baik baik dari segi pegawai maupun dari segi sarana prasarana.

#### **D. Letak Pengambilan Keputusan.**

Dalam suatu kebijakan pengambilan keputusan juga sangat penting, maka dari itu harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan. Dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku demi kepentingan bersama. Keputusan ini dinilai tepat atau tidaknya sasaran yang ditetapkan, Program KIS sudah tepat sasaran dalam mengatasi masalah yang ada dimasyarakat kurang mampu dalam bidang kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas Puruk Cahu mengemukakan :

*“Menurut saya program KIS ini sudah tepat berada di Puskesmas Puruk Cahu karena fasilitas juga sudah memadai selayaknya fasilitas tingkat pertama yang bersistem rujukan. Dengan ini juga permasalahan mereka ingin berobat yang terhalang biaya dapat terselesaikan. (wawancara 28 Juli 2020 Jam 10:15 WIB).*

peserta KIS juga mengemukakan pendapat :  
*“Menurut saya letak Program KIS di Puskesmas Puruk Cahu sudah tepat ya, karena satu satunya puskesmas yang berada dikota, dan puskesmas memang fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bersistem rujukan, jadi apabila kita ingin berobat ke rumah sakit itu harus minta surat rujukan dulu ke puskesmas. (wawancara 29 Juli 2020 Jam 12.42 WIB).*

Ditambahkan Peserta KIS lainnya :

*“Program KIS sudah tepat dipuskesmas, karena puskesmas tingkat pertama untuk berobat” (wawancara 29 Juli 2020 Jam 12.26 WIB).*

Menurut dari hasil wawancara informan diatas, Penulis menyimpulkan bahwa KIS tepat dilaksanakan di Puskesmas Puruk Cahu sebagai fasilitas tingkat pertama, dimana program kesehatan yang berjenjang. Untuk itu program KIS layak dilaksanakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini juga merupakan solusi bagi masyarakat miskin yang sulit mendapatkan pelayanan kesehatan karena terbatasnya ekonomi.

#### **E. Pelaksanaan Program.**

Dalam melaksanakan suatu kebijakan diperlukan adanya pelaksanaan program demi keberhasilan suatu kebijakan yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaan ini sangat diharapkan penggerak atau alat untuk mencapai suatu keberhasilan.

Program KIS secara langsung dilaksanakan dipuskesmas Puruk Cahu sebagaimana dikatakan pelaksana adalah penyedia dan yang memberi pelayanan kepada masyarakat dalam suatu program.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Puskesmas Puruk Cahu mengemukakan :  
*“Pelaksana program KIS adalah seluruh pegawai puskesmas, tetapi dalam proses pelaksanaan program KIS terkait dengan Masyarakat, Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah. (wawancara 28 Juli 2020 Jam 10:15 WIB).*

Dari informan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program KIS terkait dengan Masyarakat, Tenaga Kesehatan (pegawai), Dinas Kesehatan serta Pemerintah Daerah.

#### **F. Sumber daya yang digunakan.**

Dalam implementasi suatu kebijakan perlu didukung adanya sumber daya yang memberikan pengaruh positif untuk mensukseskan suatu kebijakan. Sumberdaya yang memadai akan mempermudah untuk mencapai tujuan dan akan berjalan dengan

baik apabila sumber daya memenuhi secara maksimal. Tak hanya itu sumber daya yang dibutuhkan juga yang berkualitas dengan kemampuan yang baik untuk menjalankan suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai Puskesmas Puruk Cahu mengatakan :

*“Sumber daya menurut saya sudah cukup ya, untuk fasilitas juga sudah memadai sesuai standart puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama tetapi jika berbicara sarana prasarana hanya saja koneksi jaringan seperti wifi kurang, ini sangat dibutuhkan agar mempermudah dan mempercepat kinerja kami. Untuk kendala tentu ada ya, karena ada pasien yang ingin disegerakan padahal semua perlu proses, kita juga ingin sudah memberikan yang terbaik tetapi ada saja yang tidak sabaran. (wawancara 28 Juli 2020 Jam 11.15 WIB).*

Sehubung dengan hal itu pegawai puskesmas lainnya juga mengatakan :

*“Menurut saya sumber daya sudah cukup, sarana dan prasarana sudah memadai sesuai standar fasilitas puskesmas. Untuk kendala ya itu tadi ada orang yang gak sabaran, mereka ingin memaksakan kehendaknya. (wawancara 28 Juli 2020 Jam 10.27 WIB).*

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa suatu pelaksanaan program KIS harus diperlukan implementor yang mempunyai ahli dalam bidang kesehatan, pendidikan, komunikasi yang baik, serta memiliki etika moral dan yang pasti professional dalam melaksanakan tugas. Hal lain juga penulis amati ialah harus paham dengan computer agar mempermudah dalam berkomunikasi apabila harus mengurus system rujukan, sarana prasana sangat diperlukan dalam kinerja seperti wifi dan koneksi jaringan internet lainnya.

## **2.Context Of Implementation**

### **A. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dari aktor yang terlibat.**

Dalam suatu pelaksanaan suatu kebijaka tidak lepas dari kekuasaan, kepentingan dari para aktor, baik dari pembuat

kebijakan, atau pelaksana kebijakan tersebut baik langsung ataupun tidak langsung. Kepentingan ini digunakan untuk memperlancar jalannya pelaksanaan suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai Puskesmas mengenai strategi yang dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan Program KIS :

*“Menurut saya cukup membantu dalam pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang kurang mampu, strategi yang kami berikan selalu yang terbaik agar tidak sampai dirujuk ke rumah sakit. (wawancara 28 Juli 2020 Jam 11.15 WIB).*

Peserta KIS juga mengemukakan pelayanan yang mereka peroleh atas strategi yang dilibatkan :

*“Pelayanan yang mereka berikan sudah baik, dan mereka juga ramah terhadap pasien, mereka selalu memberikan yang terbaik semaksimal yang mereka bisa. (wawancara 29 Juli 2020 Jam 12.46 WIB).*

Peserta KIS lainnya juga mengemukakan :

*“Penanganan yang mereka berikan cepat dan tanggap, misalnya ada pasien yang kondisinya parah, pegawai langsung membawa kerumah sakit tanpa harus melalui puskesmas (wawancara 29 Juli 2020 Jam 12.42 WIB).*

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas, penulis berpendapat bahwa telah banyak strategi yang dilakukan pegawai Puskesmas Puruk cahu dalam melaksanakan Program KIS, Pegawai Puskesmas juga sangat mendukung dengan adanya program KIS yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin ini dalam memperoleh pelayanan kesehatan guna mengurangi angka kematian. Upaya yang mereka lakukan juga mensosialisasikan Program KIS kepada masyarakat, memberikan pelayanan secara maksimal kepada peserta KIS tanpa harus membeda-bedakan.

### **B. Karakteristik dari Lembaga dan Rezim yang berkuasa.**

Dalam suatu kebijakan lingkungan juga sangat berpengaruh dilaksanakannya suatu kebijakan karena karakteristik dari



lembaga mempengaruhi kebijakan. Karakteristik yang dimaksud dalam hal ini harus sesuai dengan tugas dan pokok masing-masing yang terkait dalam melaksanakan tugas.

Peneliti dalam hal ini bagaimana peran kepala puskesmas sebagai pemimpin dalam mempengaruhi kinerja pegawai untuk mewujudkan keberhasilan KIS di Puskesmas Puruk Cahu.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Puskesmas mengemukakan :

*“Saya sebagai Kepala Puskesmas sudah melakukan tugas dengan baik, bagaimana saya mendukung dan memotivasi pegawai dalam menjalankan tugasnya masing-masing, apalagi dengan program ini saya tekankan agar tidak ada perbedaan dalam pelayanan. ( wawancara 28 Juli 2020 Jam 10.15 WIB).*

Pegawai Puskesmas Juga mengatakan

*“Untuk Kepala puskesmas dalam mengambil keputusan cukup adil dalam keberhasilan program KIS ini, beliau juga sering memotivasi pegawai dan selalu mengingatkan agar tidak membedakan dalam memberikan pelayanan” (wawancara 28 Juli 2020 Jam 11.15 WIB).*

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kepala puskesmas sangat penting dalam suatu keberhasilan program KIS, beliau berlaku adil dan selalu memotivasi agar pegawai selalu semangat dan juga selalu mengingatkan bahwa jangan membedakan pelayanan semua sama.

### **C. Tingkat kepatuhan dan adanya Respon Para Pelaksana.**

Bagi peneliti hal ini sangat penting dalam proses pelaksanaan kebijakan dimana harus adanya kepatuhan dan respon dari pelaksana. Pembahasan dipoint ini sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana. Hal ini juga dapat menilai pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam pengimplementasian. Agar program KIS dilaksanakan secara baik, optimal dan berdaya guna.

Berdasarkan hasil wawancara terkait kepatuhan dan respon Kepala Puskesmas mengemukakan :

*“Sejauh ini sudah baik, pegawai sudah menjalankan program dengan semaksimal mungkin, Kepatuhan juga sudah baik meskipun terkadang ada kelalaian dari mereka, semoga kesepannya dapat diperbaiki*

peserta KIS juga mengemukakan tentang kepatuhan dan respon bahwa :

*“Kinerjanya sudah baik, meskipun terkadang mereka ada yang datang lambat, tetapi tidak jadi masalah mereka tetap memberikan pelayanan yang baik. (wawancara 29 Juli 2020 Jam 12.26 WIB).*

Peserta KIS lainnya juga berpendapat :

*“Mereka melayani dengan ramah, tapi ada juga yang tidak ramah mungkin mereka lagi ada masalah dirumah sehingga dibawa kepekerjaan, menurut saya sih gak masalah karena itu tidak setiap hari begitu. (wawancara 29 Juli 2020 Jam 12.42 WIB).*

Berdasarkan informasi dari wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa meskipun ada pegawai yang kinerjanya kurang namun tak menutup kemungkinan mereka tetap memberikan pelayanan yang terbaik, harapannya semoga kedepannya lebih baik lagi terhadap kinerja dan respon .

### **3.KENDALA DALAM PENGIMPLEMENTASIAN PROGRAM KARTU INDONESIA SEHAT PADA PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PURUK CAHU.**

Dalam pengimplementasian tentu saja masih banyak kendala-kendala yang dihadapi, faktor penghambatnya dapat dilihat dari teori Grindle yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Hanya Ada beberapa kendala dalam pengimplementasian program Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Puruk cahu yaitu seperti kurangnya koneksi jaringan, karena koneksi sangat mempercepat proses kinerja pegawai, ada juga kendala yang dihadapi seperti orang tidak sabar yang selalu ingin di dahulukan.

## V. KESIMPULAN

Program kartu Indonesia sehat merupakan salah satu program sebagai bentuk perwujudan dari Nawa Cita Presiden Joko Widodo. Kartu Indonesia Sehat adalah kartu identitas jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai bentuk pelaksanaan program Kartu Indonesia Sehat. Kartu Indonesia Sehat (KIS) ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang kurang mampu, dimana mereka mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis tanpa dipunggut biaya apapun karena sudah ditanggung oleh pemerintah

Dalam melaksanakan program masih ada beberapa kendala tapi masih bisa berjalan dengan baik.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka agar implementasi ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan yang diinginkan

1. Kepala puskesmas di harapkan meningkatkan kesadaran pegawai, perlu memberi sanksi apabila ada yang telat dengan alasan yang tidak jelas, agar pasien tidak menunggu terlalu lama.
2. Lebih banyak memberikan penyuluhan tentang kesehatan dan juga penyuluhan tentang program KIS ini.
3. Kepada pegawai disarankan untuk selalu ramah kepada pasien, dan tetap selalu memberikan yang terbaik dalam memberikan pelayanan kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik ( teori, proses, dan kasus)*. Edisi 02. CAPS. Yogyakarta.

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik konsep, teori dan aplikasi*. Edisi 01. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Afrizal. 2019. *Metode penelitian Kualitatif*. Edisi 04. Rajawali Pers. Depok.

### Sumber Undang-Undang

Undang-Undang dasar 1945 Pasal 28.

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang No.40 tahun 2004 Tentang Sistem jaminan Sosial Nasional.

Undang-undang No. 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan.

Intruksi Presiden No. 07 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, program Indonesia sehat.

### Jurnal

Tobari Anang “*Implementasi Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Batu Desa Pesangrahn Kecamatan Batu*” Jurnal Respon Publik, Vol.13, No. 5, Tahun 2019, h.1. Diakses pada hari Selasa tanggal 20 April 2020 Pukul 18.20 WIB.

Manik Zulfanda, Badiran Muhammad, Anto “*Hubungan Kebijakan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga Terhadap Angka Kematian Bayi*” Jurnal Kesmes Prima Indonesia, Vol.2 No.1 Tahun 2020, h.1. Diakses pada hari Senin Tanggal 27 April 2020 Pukul 15.23 WIB.

### Skripsi

Aziz M. Imam Abdul, 2019. *Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat Di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Indralaya.

Sianturi Danawita, 2018. *Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat Pada Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Kecamatan Dolok*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Medan.

Putra Tommy Adi, 2017. *Implementasi Program Kartu Lebak Sehat Di Kabupaten Lebak*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Serang.